

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel pada laporan keuangan pemerintah daerah yang tersedia dalam situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2012-2013. Berdasarkan metode *purposive sampling* yang telah ditetapkan pada bab III, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 160 sampel laporan keuangan yang memenuhi kriteria. Adapun prosedur pemilihan sebagai berikut:

Tabel:4.1  
Tabel Kriteria Data

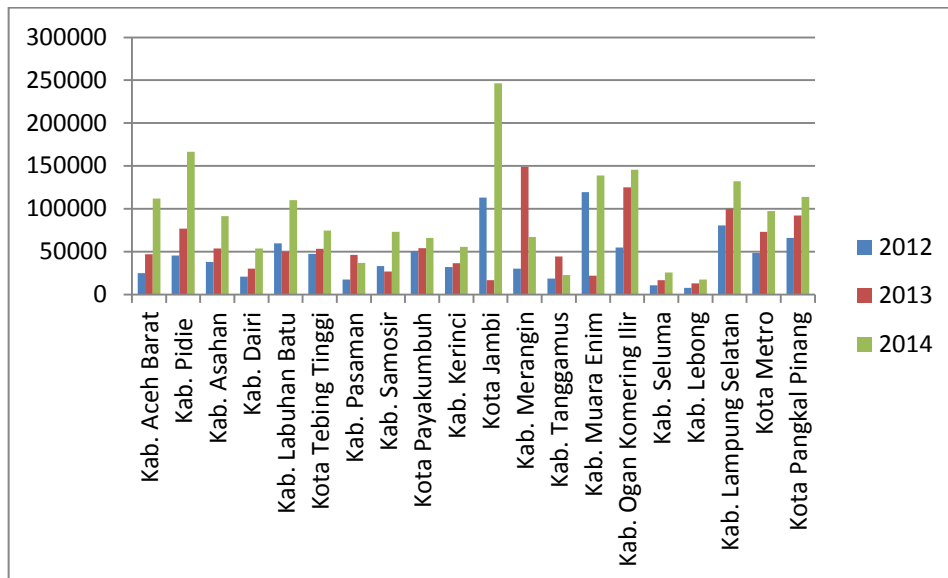
No.	Kriteria	Jumlah	Keterangan
1	Laporan realisasi Kabupaten dan Kota berdasarkan format Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tahun 2012-2014	836	Berupa Laporan laba-rugi yang terdiri dari masukan dan pengeluaran pemerintahan (Pendapatan Daerah, Dana Transfer, Belanja Daerah)
2	Laporan realisasi yang tidak terupdate	122	Data tahun 2012,2013,2014,2015 tidak lengkap tahun per tanggal 21 November 2014
3	Laporan realisasi yang tidak lengkap antara tahun 2012, 2013 dan 2014	459	Merupakan data yang tidak ada secara berurutan pada tahun 2012,2013,2014,2015 format SAP
	Jumlah sampel yang diteliti	243	

Sumber: Data diolah peneliti

## B. Uji Analisis Data

### 1. Analisis statistik deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan simpangan baku (standar deviation) dari variabel independen dan variabel dependen. Hasil statistik ditunjukkan pada gambar dan tabel berikut:



Sumber: Laporan realisasi anggaran tahun DJPK (diolah peneliti)

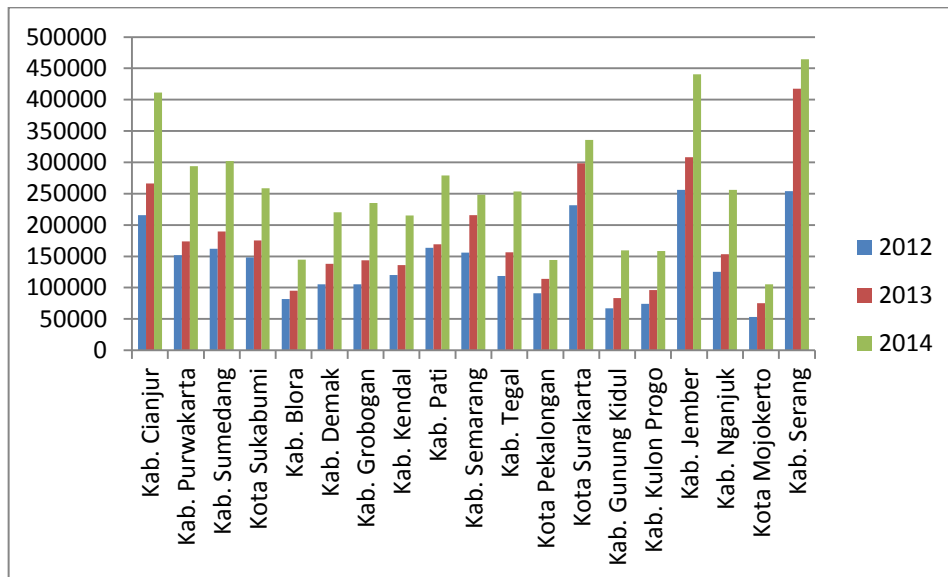
\*dalam jutaan Rupiah

Gambar: 4.1

Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2012-2014

Gambar diatas menunjukkan data PAD kabupaten/kota di pulau Sumatera dengan jumlah 20 kabupaten/kota. Adapun PAD tertinggi pada tahun 2012 adalah kabupaten Muara Enim sedangkan PAD terendah adalah kabupaten Lebong. PAD tertinggi pada tahun 2013 adalah kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan PAD terendah adalah kabupaten

Lebong. PAD tertinggi pada tahun 2014 adalah kota Jambi sedangkan PAD terendah adalah kabupaten Lebong.



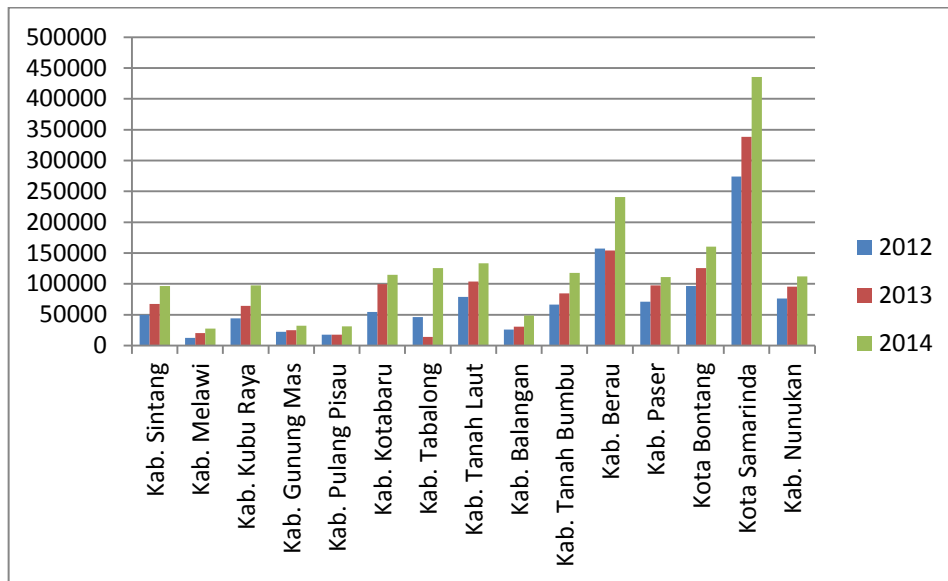
Sumber: Laporan realisasi anggaran tahun DJPK (diolah peneliti)

\*dalam jutaan Rupiah

Gambar: 4.2

Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun anggaran 2012-2014

Gambar diatas menunjukkan data PAD kabupaten/kota di pulau Jawa dengan jumlah 19 kabupaten/kota. Adapun PAD tertinggi pada tahun 2012 adalah kabupaten Jember sedangkan PAD terendah adalah kota Mojokerto. PAD tertinggi pada tahun 2013 adalah kabupaten Serang sedangkan PAD terendah adalah kabupaten Gunung Kidul. PAD tertinggi pada tahun 2014 adalah kota Serang sedangkan PAD terendah adalah kota Mojokerto.



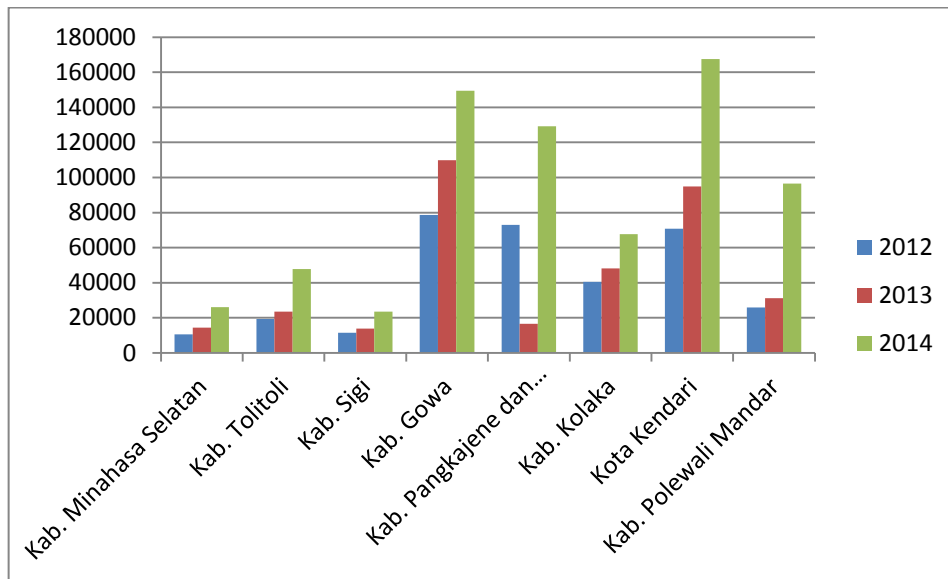
Sumber: Laporan realisasi anggaran DJPK (diolah peneliti)

\*dalam jutaan Rupiah

Gambar: 4.3

Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan tahun anggaran 2012-2014

Gambar diatas menunjukkan data PAD kabupaten/kota di pulau Sumatera dengan jumlah 15 kabupaten/kota. Adapun PAD tertinggi pada tahun 2012 adalah kota Samarinda sedangkan PAD terendah adalah kabupaten Melawi. PAD tertinggi pada tahun 2013 adalah kota Samarinda sedangkan PAD terendah adalah kabupaten Melawi. PAD tertinggi pada tahun 2014 adalah kota Samarinda sedangkan PAD terendah adalah kabupaten Melawi.



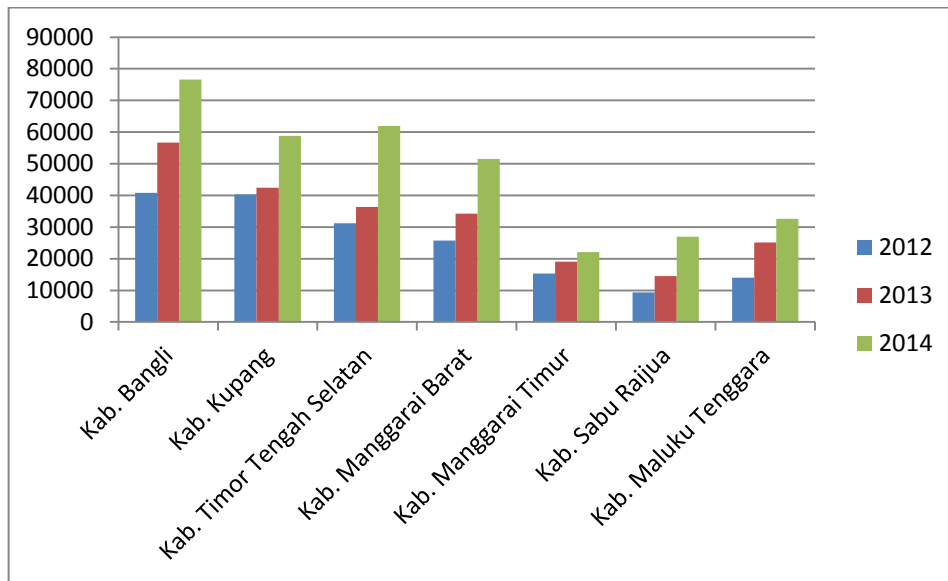
Sumber: Laporan realisasi anggaran DJPK (diolah peneliti)

\*dalam jutaan Rupiah

Gambar: 4.4

Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Sulawesi tahun anggaran 2012-2014

Gambar diatas menunjukkan data PAD kabupaten/kota di pulau Sulawesi dengan jumlah 8 kabupaten/kota. Adapun PAD tertinggi pada tahun 2012 adalah kabupaten Gowa sedangkan PAD terendah adalah kabupaten Minahasa Selatan. PAD tertinggi pada tahun 2013 adalah kabupaten Gowa sedangkan PAD terendah adalah kabupaten Sigi. PAD tertinggi pada tahun 2014 adalah kota Kendari sedangkan PAD terendah adalah kabupaten Sigi.

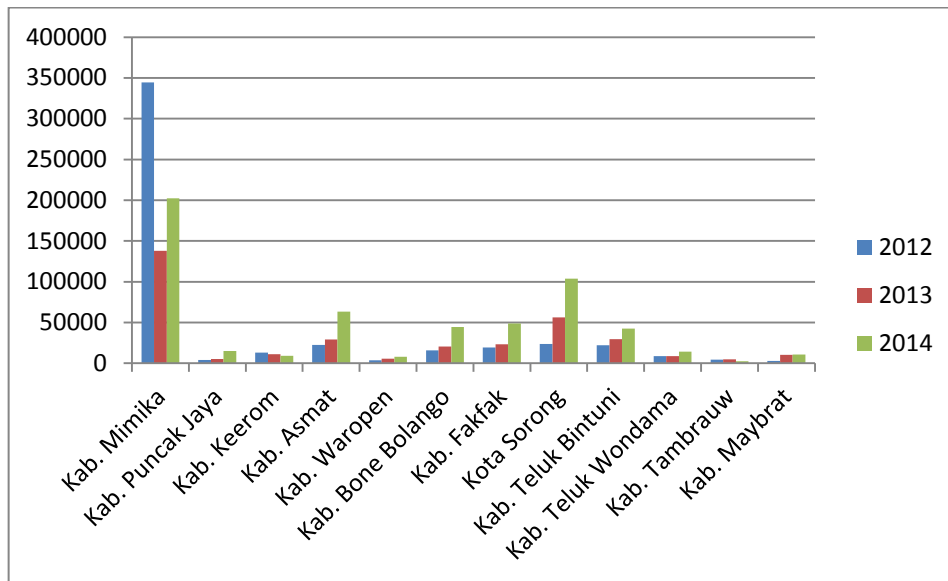


Sumber: Laporan realisasi anggaran DJPK (diolah peneliti)

\*dalam jutaan Rupiah

Gambar: 4.5  
Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Kepulauan Nusa Tenggara dan kepulauan Maluku tahun anggaran 2012-2014

Gambar diatas menunjukkan data PAD kabupaten/kota di Nusa Tenggara dan Maluku dengan umlah 7 kabupaten/kota. Adapun PAD tertinggi pada tahun 2012 adalah kabupaten Bangli sedangkan PAD terendah adalah kabupaten Sabu Raijua. PAD tertinggi pada tahun 2013 adalah kabupaten Bangli. sedangkan PAD terendah adalah kabupaten Sabu Raijua. PAD tertinggi pada tahun 2014 adalah Kabupaten Bangli sedangkan PAD terendah adalah kabupaten Sabu Raijua.



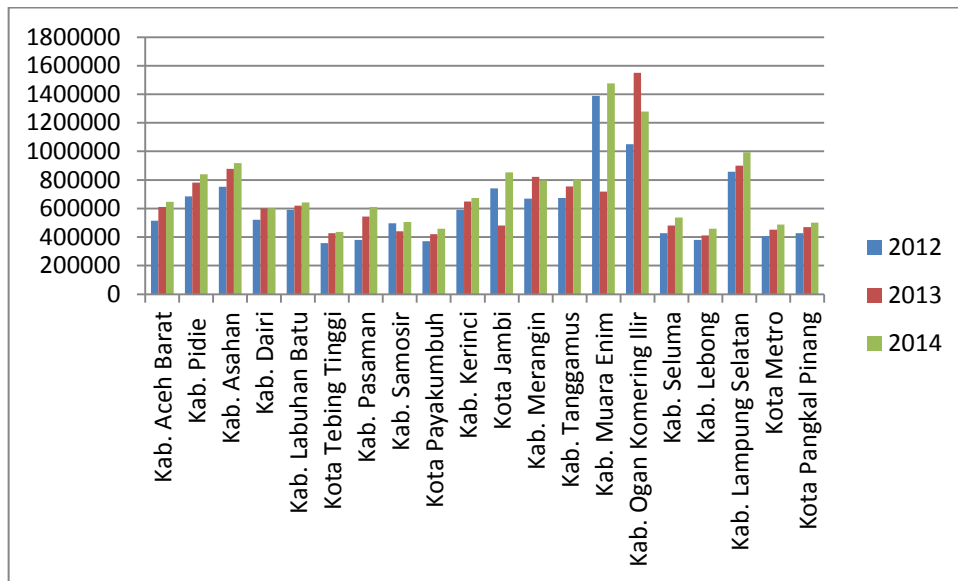
Sumber: Laporan realisasi anggaran DJPK (diolah peneliti)

\*dalam jutaan Rupiah

Gambar: 4.6

Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Papua tahun anggaran 2012-2014

Gambar diatas menunjukkan data PAD kabupaten/kota di pulau Papua dengan jumlah 12 kabupaten/kota. Adapun PAD tertinggi pada tahun 2012 adalah kabupaten Mimika sedangkan PAD terendah adalah kabupaten Waropen. PAD tertinggi pada tahun 2013 adalah kabupaten Mimika, sedangkan PAD terendah adalah kabupaten Tambraw. PAD tertinggi pada tahun 2014 adalah kabupaten Mimika sedangkan PAD terendah adalah kabupaten Tambraw.



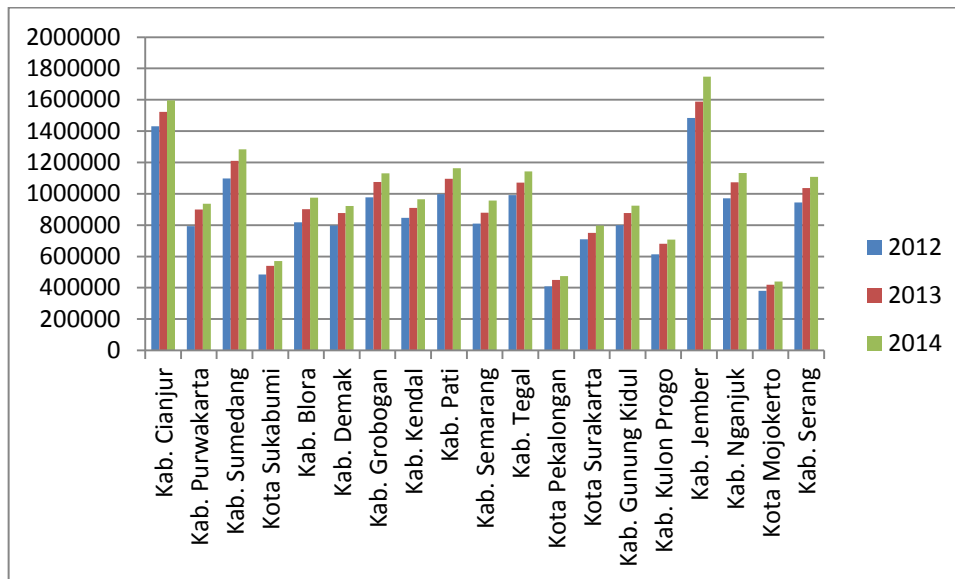
Sumber: Laporan realisasi anggaran DJPK (diolah peneliti)

\*dalam jutaan Rupiah

Gambar: 4.7  
Data Dana Perimbangan Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2012-2014

Gambar diatas menunjukkan data Dana Perimbangan (DP) kabupaten/kota di pulau Sumatera dengan jumlah 20 kabupaten/kota. Adapun DP tertinggi pada tahun 2012 adalah kabupaten Muara Enim sedangkan DP terendah adalah kota Tebing Tinggi. DP tertinggi pada tahun 2013 adalah kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan DP terendah adalah kota Tebing Tinggi. DP tertinggi pada tahun 2014 adalah kabupaten Muara Enim sedangkan DP terendah adalah kota Tebing Tinggi.



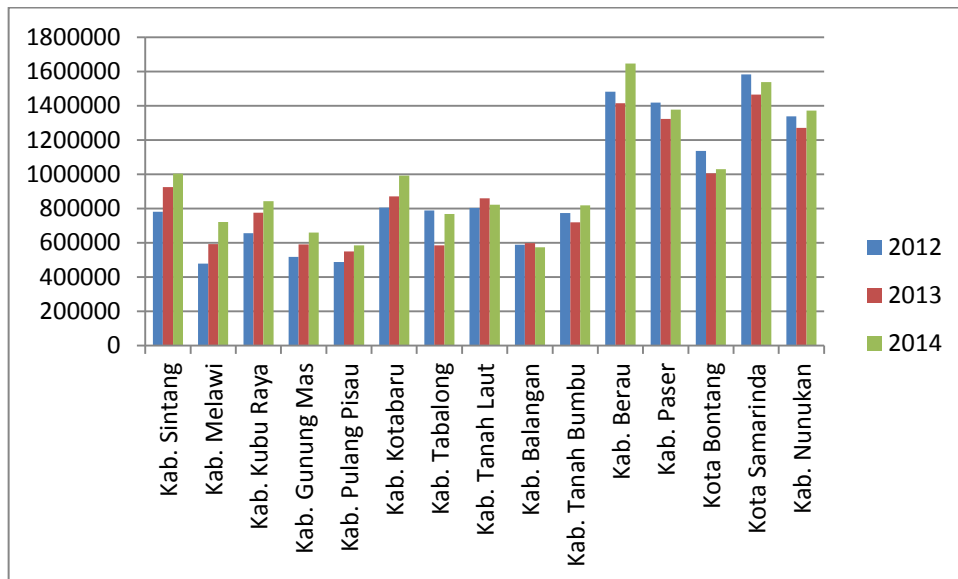


Sumber: Laporan realisasi anggaran DJPK (diolah peneliti)

\*dalam jutaan Rupiah

Gambar: 4.8  
Data Dana Perimbangan Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun anggaran 2012-2014

Gambar diatas menunjukkan data Dana Perimbangan (DP) kabupaten/kota di pulau Jawa dengan jumlah 19 kabupaten/kota. Adapun DP tertinggi pada tahun 2012 adalah kabupaten Jember sedangkan DP terendah adalah kota Mojokerto. DP tertinggi pada tahun 2013 adalah kabupaten Jember sedangkan DP terendah adalah kota Mojokerto. DP tertinggi pada tahun 2014 adalah kabupaten Jember sedangkan DP terendah adalah kota Mojokerto.

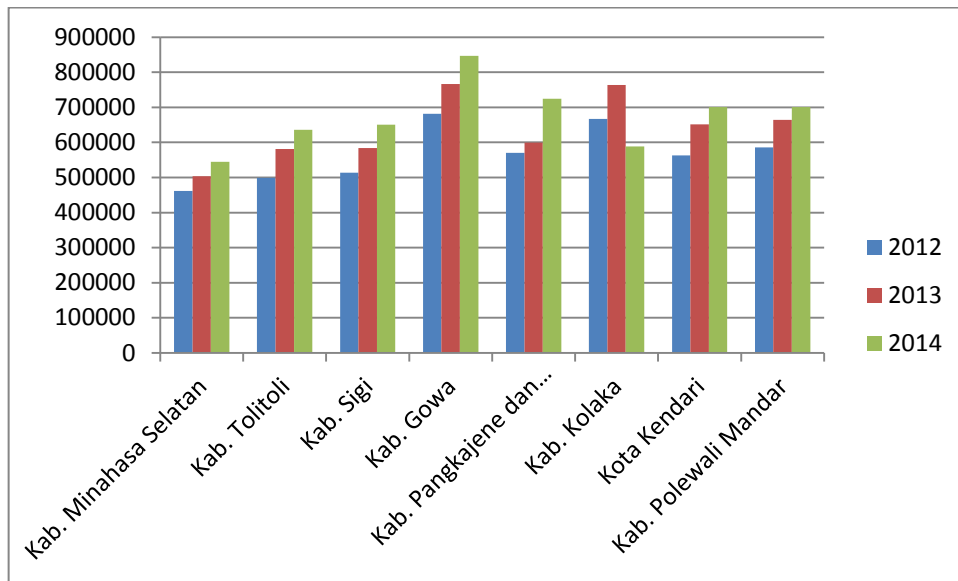


Sumber: Laporan realisasi anggaran DJPK (diolah peneliti)

\*dalam jutaan Rupiah

Gambar: 4.9  
Data Dana Perimbangan Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan tahun anggaran 2012-2014

Gambar diatas menunjukkan data Dana Perimbangan (DP) kabupaten/kota di pulau Kalimantan dengan jumlah 15 kabupaten/kota. Adapun DP tertinggi pada tahun 2012 adalah kota Samarinda sedangkan DP terendah adalah kabupaten Melawi. DP tertinggi pada tahun 2013 adalah kabupaten Berau sedangkan DP terendah adalah kabupaten Pulang Pisau. DP tertinggi pada tahun 2014 adalah kabupaten Berau sedangkan DP terendah adalah kabupaten Balangan.

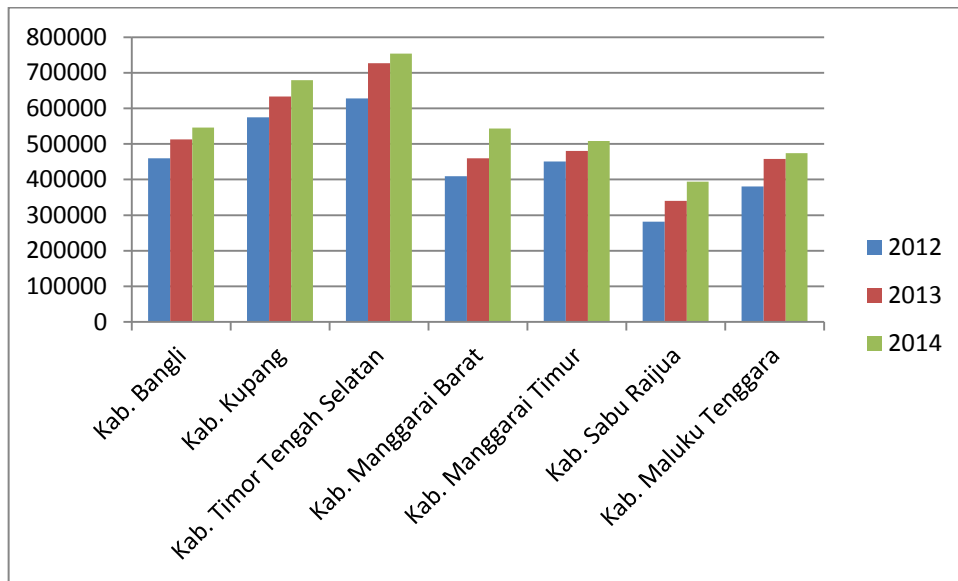


Sumber: Laporan realisasi anggaran DJPK (diolah peneliti)

\*dalam jutaan Rupiah

Gambar: 4.10  
Data Dana Perimbangan Kabupaten dan Kota di Pulau Sulawesi  
tahun anggaran 2012-2014

Gambar diatas menunjukkan data Dana Perimbangan (DP) kabupaten/kota di pulau Sulawesi dengan jumlah 8 kabupaten/kota. Adapun DP tertinggi pada tahun 2012 adalah kabupaten Gowa sedangkan DP terendah adalah kabupaten Minahasa Selatan. DP tertinggi pada tahun 2013 adalah kabupaten Gowa sedangkan DP terendah adalah kabupaten Minahasa Selatan. DP tertinggi pada tahun 2014 adalah kabupaten Gowa sedangkan DP terendah adalah kabupaten Minahasa Selatan.

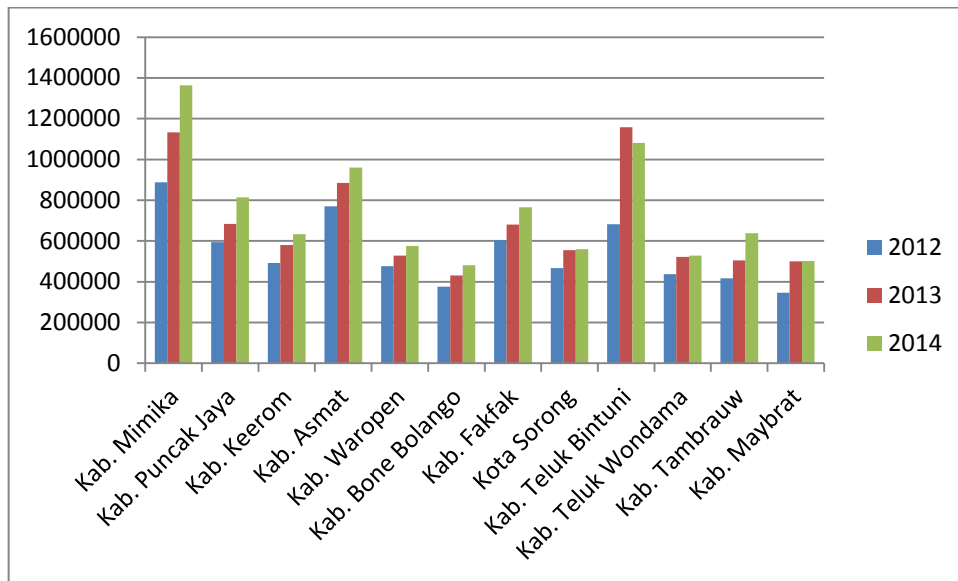


Sumber: Laporan realisasi anggaran DJPK (diolah peneliti)

\*dalam jutaan Rupiah

Gambar: 4.11  
Data Dana Perimbangan Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara dan Maluku tahun anggaran 2012-2014

Gambar diatas menunjukkan data Dana Perimbangan (DP) kabupaten/kota di Nusa Tenggara dan Maluku dengan jumlah 20 kabupaten/kota. Adapun DP tertinggi pada tahun 2012 adalah kabupaten Timor Tengah Selatan sedangkan DP terendah adalah kabupaten Sabu Raijua. DP tertinggi pada tahun 2013 adalah kabupaten Timor Tengah Selatan sedangkan DP terendah adalah kabupaten Sabu Raijua. DP tertinggi pada tahun 2014 adalah kabupaten Timor Tengah Selatan sedangkan DP terendah adalah kabupaten Sabu Raijua.

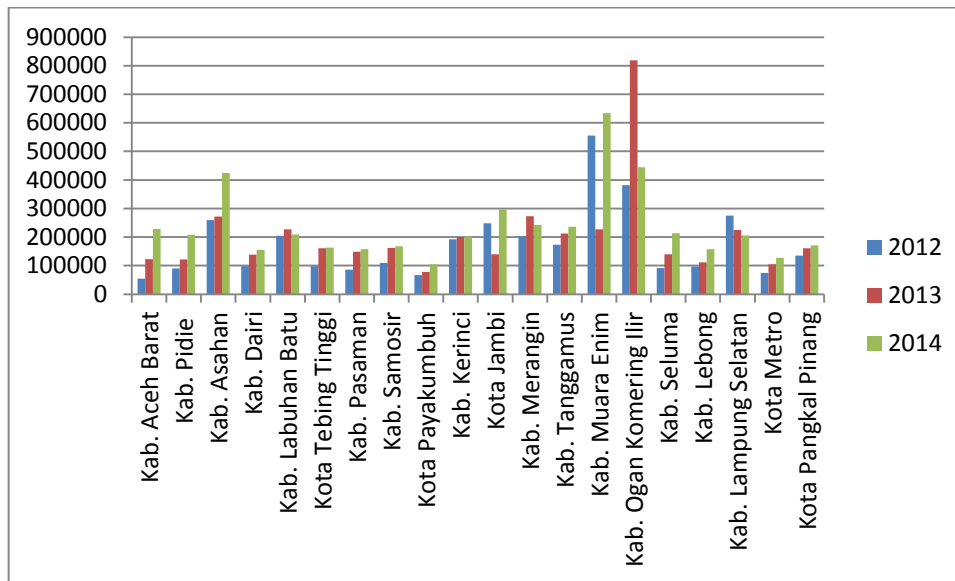


Sumber: Laporan realisasi anggaran DJPK (diolah peneliti)

\*dalam jutaan Rupiah

Gambar: 4.12  
Data Dana Perimbangan Kabupaten dan Kota di Papua  
tahun anggaran 2012-2014

Gambar diatas menunjukkan data Dana Perimbangan (DP) kabupaten/kota di pulau Sumatera dengan jumlah 12 kabupaten/kota. Adapun DP tertinggi pada tahun 2012 adalah kabupaten Mimika sedangkan DP terendah adalah kabupaten Bone Bolango. DP tertinggi pada tahun 2013 adalah kabupaten Mimika sedangkan DP terendah adalah kabupaten Bone Bolango. DP tertinggi pada tahun 2014 adalah kabupaten Mimika sedangkan DP terendah adalah kabupaten Bone Bolango.

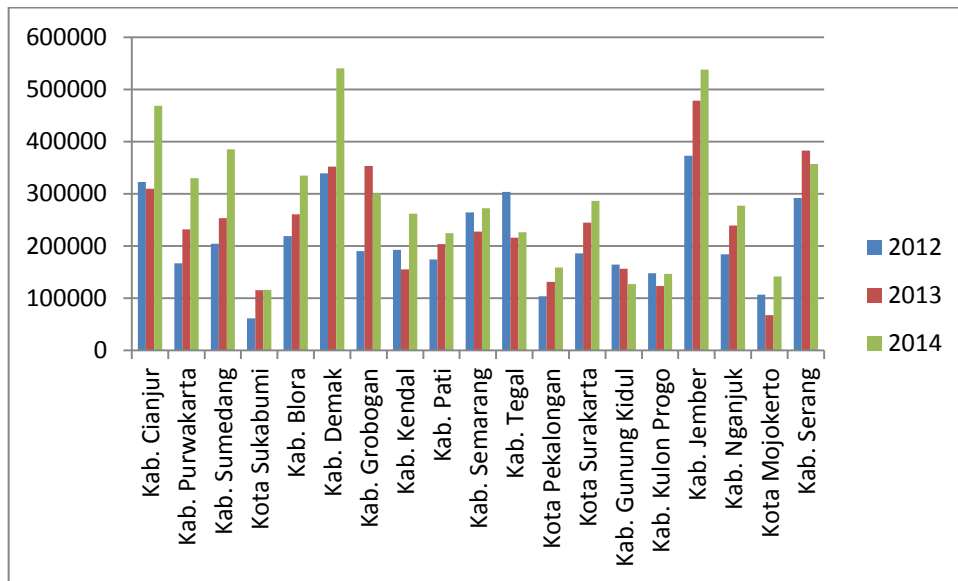


Sumber: Laporan realisasi anggaran DJPK (diolah peneliti)

\*dalam jutaan Rupiah

Gambar: 4.13  
Data Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera  
tahun anggaran 2012-2014

Gambar diatas menunjukkan data Belanja Modal (BM) kabupaten/kota di pulau Sumatera dengan jumlah 20 kabupaten/kota. Adapun BM tertinggi pada tahun 2012 adalah kabupaten Muara Enim sedangkan BM terendah adalah kota Payakumbuh. BM tertinggi pada tahun 2013 adalah kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan BM terendah adalah kota Payakumbuh. BM tertinggi pada tahun 2014 adalah kabupaten Muara Enim sedangkan BM terendah adalah kota Payakumbuh.

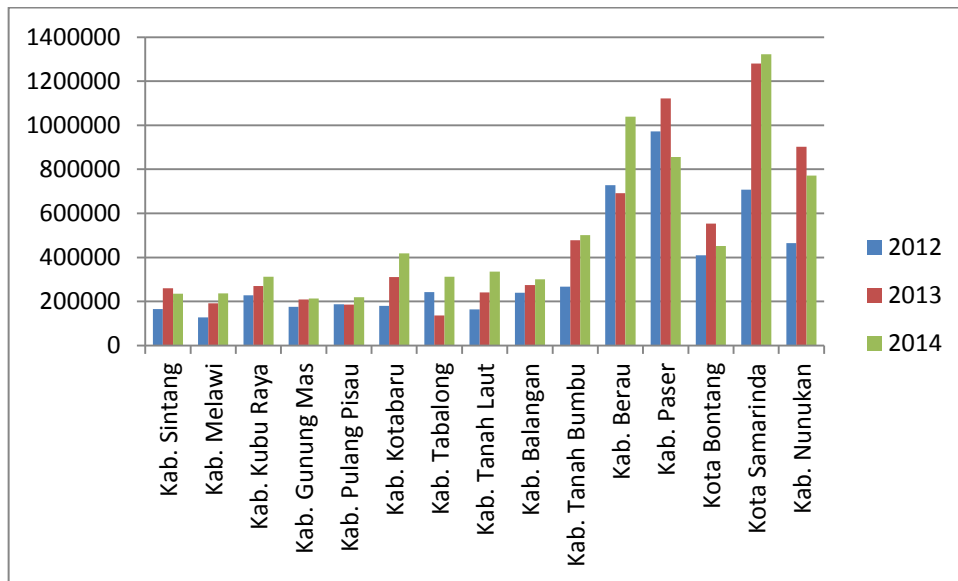


Sumber: Laporan realisasi anggaran DJPK (diolah peneliti)

\*dalam jutaan Rupiah

Gambar: 4.14  
Data Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa  
tahun anggaran 2012-2014

Gambar diatas menunjukkan data Belanja Modal (BM) kabupaten/kota di pulau Jawa dengan jumlah 19 kabupaten/kota. Adapun BM tertinggi pada tahun 2012 adalah kabupaten Jember sedangkan BM terendah adalah kota Sukabumi. BM tertinggi pada tahun 2013 adalah kabupaten kabupaten Jember sedangkan BM terendah adalah kota Sukabumi. BM tertinggi pada tahun 2014 adalah kabupaten Demak sedangkan BM terendah adalah kota Sukabumi.



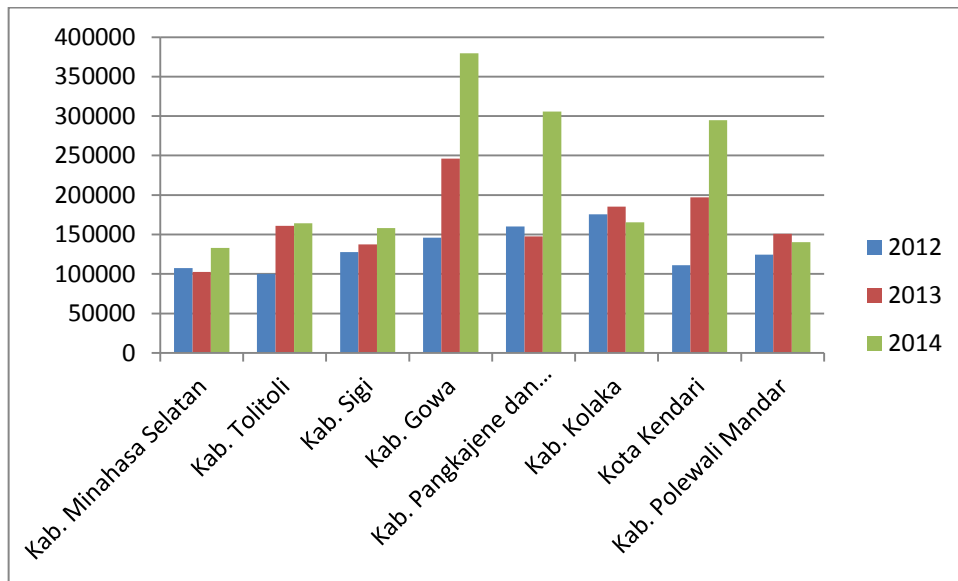
Sumber: Laporan realisasi anggaran DJPK (diolah peneliti)

\*dalam jutaan Rupiah

Gambar: 4.15  
Data Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan tahun anggaran 2012-2014

Gambar diatas menunjukkan data Belanja Modal (BM) kabupaten/kota di pulau Kalimantan dengan jumlah 15 kabupaten/kota. Adapun BM tertinggi pada tahun 2012 adalah kabupaten Berau sedangkan BM terendah adalah kabupaten Melawi. BM tertinggi pada tahun 2013 adalah kota Samarinda sedangkan BM terendah adalah kota Tabalong. BM tertinggi pada tahun 2014 adalah kota Samarinda sedangkan BM terendah adalah kabupaten Gunung Mas.



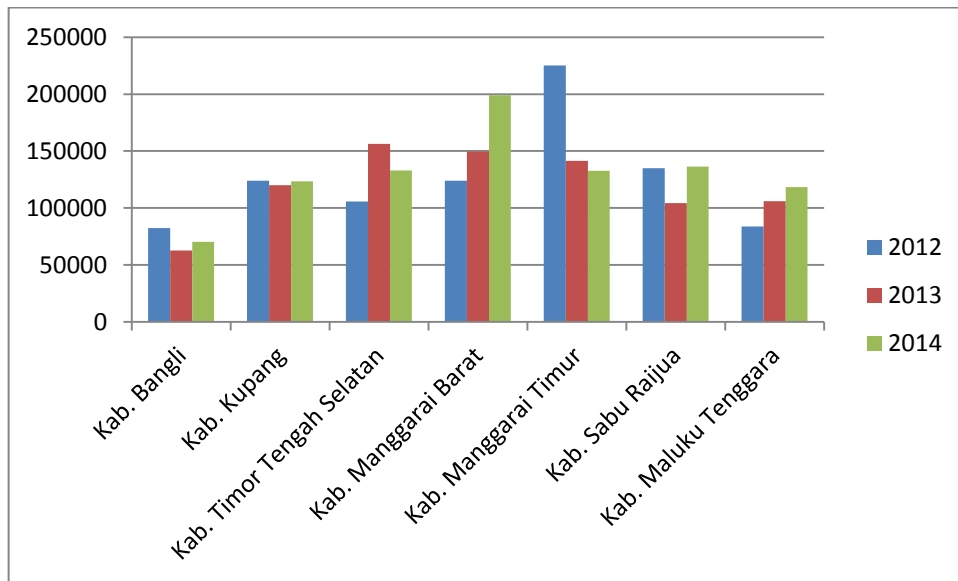


Sumber: Laporan realisasi anggaran DJPK (diolah peneliti)

\*dalam jutaan Rupiah

Gambar: 4.16  
Data Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Pulau Sulawesi  
tahun anggaran 2012-2014

Gambar diatas menunjukkan data Belanja Modal (BM) kabupaten/kota di pulau Sulawesi dengan jumlah 8 kabupaten/kota. Adapun BM tertinggi pada tahun 2012 adalah kabupaten Kolaka sedangkan BM terendah adalah Toli-toli. BM tertinggi pada tahun 2013 adalah kabupaten kabupaten Gowa sedangkan BM terendah adalah kabupaten Minahasa Selatan. BM tertinggi pada tahun 2014 adalah kabupaten Gowa sedangkan BM terendah adalah kabupaten Minahasa Selatan.

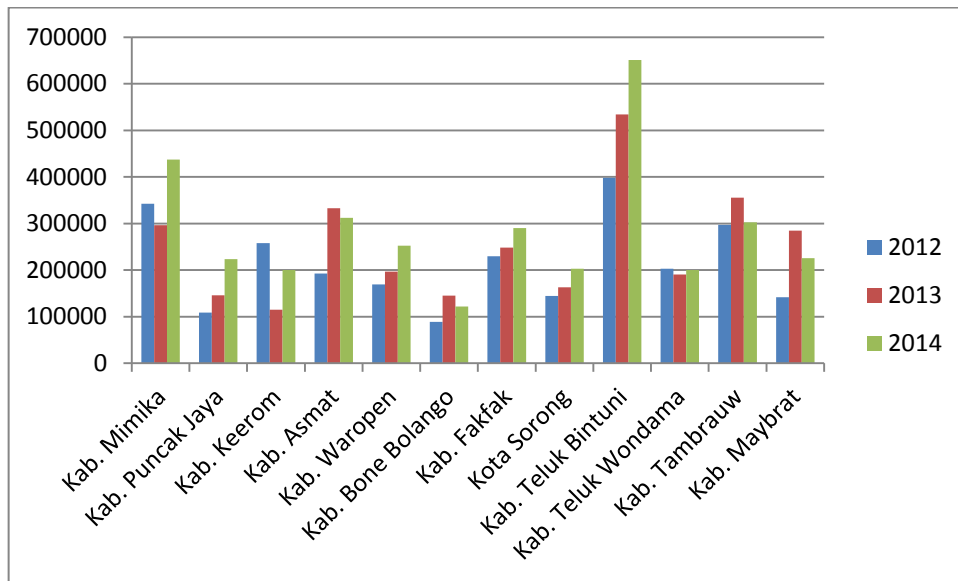


Sumber: Laporan realisasi anggaran DJPK (diolah peneliti)

\*dalam jutaan Rupiah

Gambar: 4.17  
Data Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Kepulauan Nusa Tenggara dan kepulauan Maluku tahun anggaran 2012-2014

Gambar diatas menunjukkan data Belanja Modal (BM) kabupaten/kota di Nusa Tenggara dan Maluku dengan jumlah 7 kabupaten/kota. Adapun BM tertinggi pada tahun 2012 adalah kabupaten Manggarai Timur sedangkan BM terendah adalah kabupaten Bangli BM tertinggi pada tahun 2013 adalah kabupaten kabupaten Timor Tengah Selatan sedangkan BM terendah adalah kabupaten Bangli. BM tertinggi pada tahun 2014 adalah kabupaten Manggarai Barat sedangkan BM terendah adalah kabupaten Bangli.



Sumber: Laporan realisasi anggaran DJPK (diolah peneliti)

\*dalam jutaan Rupiah

Gambar: 4.18  
Data Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Papua  
tahun anggaran 2012-2014

Gambar diatas menunjukkan data Belanja Modal (BM) kabupaten/kota di Papua dengan jumlah 12 kabupaten/kota. Adapun BM tertinggi pada tahun 2012 adalah kabupaten Teluk Bintuni sedangkan BM terendah adalah kabupaten Bone Bolango. BM tertinggi pada tahun 2013 adalah kabupaten kabupaten Teluk Bintuni sedangkan BM terendah adalah kabupaten Keerom. BM tertinggi pada tahun 2014 adalah kabupaten Teluk Bintuni sedangkan BM terendah adalah kabupaten Bone Bolango.

Tabel:4.2  
Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
lnPAD	243	7,89	13,05	10,9538	1,08075
lnDP	243	12,55	14,37	13,4639	,38229
lnBM	243	10,91	14,10	12,2559	,58581
ln_KNJ	243	1,27	5,56	4,1075	,79489
Valid N (listwise)	243				

Sumber: Output SPSS 22

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang sifatnya penting bagi daerah dalam jangka panjang. Hasil uji Statistik Deskriptif yang telah diolah pada tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah sampel (N) sebanyak 243. Jumlah rata-rata PAD ( $X_1$ ) sebesar 10,9538 dimana jumlah PAD terendah sebesar 7,89 dan PAD tertinggi 13,06 dengan standar deviasi 1,08075.

Dana Perimbangan adalah dana transfer yang bersifat terikat dari pemerintah pusat yang diberikan oleh pemerintah daerah, yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan daerah dan menutupi kesenjangan fiskal daerah. Jumlah Dana Perimbangan yang telah ditetapkan di dalam setiap tahunnya, didasarkan oleh pengeluaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Berdasarkan tabel 4.2 di atas rata-rata jumlah Dana Perimbangan ( $X_2$ ) sebesar

13,4639 dengan jumlah DAK terendah 12,55 dan jumlah Dana Perimbangan tertinggi 14,37 dengan Standar Deviasi ,38229 dari rata-rata.

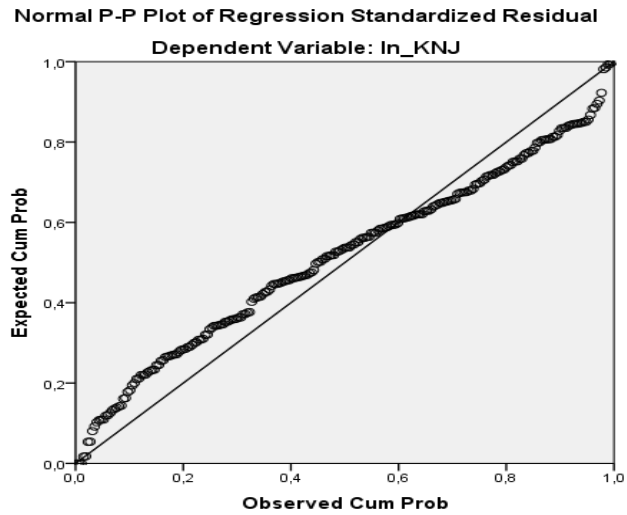
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam hal ini pembelanjaan modal yang dimaksud dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan , maupun dalam bentuk fisik lainnya. Rata-rata jumlah belanja modal ( $X_3$ ) sebesar 12,2559 dengan jumlah belanja modal terendah 10,91 dan jumlah belanja modal tertinggi 14,10 dengan Standar Deviasi ,58581 dari rata-rata.

Kinerja keuangan pemerintah adalah capaian dari suatu hasil kerja pemerintah daerah pada bidang keuangan daerah yang dapat berupa anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan sebagai alat ukur keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam suatu sistem yang telah ada dalam ketetapan melalui undang-undang dan berlaku dalam satu periode anggaran. Rata-rata jumlah Kinerja Keuangan (Y) sebesar 4,1075 dengan jumlah belanja modal terendah 1,27 dan jumlah belanja modal tertinggi 5,56 dengan Standar Deviasi ,79489 dari rata-rata.

## C. Uji Kualitas Data

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozalli, 2005). Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau error akan terdistribusi secara simetri di sekitar nilai means sama dengan nol. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat juga dilihat melalui grafik histogram dan grafik normal plot. Dalam penelitian ini uji normalitas dapat di uji menggunakan kolmogorov smirnov terhadap masing-masing variabel, dan juga dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada normal *P Plot of Regression Standardized Residual* variabel independen. Berikut ini adalah hasil uji Normalitas data dengan analisis grafik *Normal Probability Plot* :



Gambar: 4.19  
 Analisis Grafik *Normal Probability Plot*

Hasil *Normal Probability Plot* pada gambar 4.1 di atas dapat diketahui bahwa sumbu menyambung ke garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa *Normal Probability Plot* berdistribusi secara normal. Berikut ini adalah hasil uji normalitas data dengan uji statistik *One Sample Kolmogorov-Smirnov (1 K-S)*:

Tabel:4.3  
Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		157
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-2,0564025
	Std. Deviation	1,04575358
Most Extreme Differences	Absolute	,060
	Positive	,043
	Negative	-,060
Test Statistic		,060
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Output SPSS 22

Dari hasil test of normality diketahui nilai statistik 0,060 atau nilai sig 0,200 atau 20% lebih besar dari nilai  $\alpha$  5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukannya adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozalli, 2005). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari



(1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor (VIF)*. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dimana jika nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas, sedangkan jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka diindikasikan model tersebut memiliki gejala multikolinieritas. Berikut ini adalah hasil Uji Multikolonieritas:

Tabel:4.4  
Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6,812	,321		21,250	,000		
LnPAD	,904	,010	1,229	93,978	,000	,531	1,885
LnDP	-,900	,040	-,433	-22,612	,000	,248	4,037
LnBM	-,040	,021	-,029	-1,861	,064	,364	2,746

a. Dependent Variable: ln\_KNJ

Sumber : Output SPSS 22

Hasil Uji Multikolonieritas setelah Ln pada tabel 4.4 di bawah dapat dilihat bahwa variabel independen yaitu LnPAD, LnDP, dan LnBM mempunyai angka VIF < 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 10% ( $\alpha = 0,10$ ). Hal ini berarti bahwa regresi yang dipakai untuk variabel diatas tidak terdapat persoalan multikolonieritas.



### 3. Uji Autokorelasi

Uji ini berguna untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini dengan kesalahan pengganggu pada periode saat ini dengan kesalahan pengganggu. Masalah ini timbul karena variabel pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data *time series*. Menurut Ghozalli (2005) “Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Pada penelitian ini, autokorelasi diuji dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test).

- a. Jika  $d$  lebih kecil dari  $dL$  atau lebih besar dari  $(4-dL)$  maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- b. Jika  $d$  terletak antara  $dU$  dan  $(4-dU)$ , maka hipotesis nol diterima yang berarti tidak terdapat autokorelasi.
- c. Jika  $d$  terletak antara  $dL$  dan  $dU$  atau antara  $(4-dU)$  dan  $(4-dL)$ , maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Apabila hasil uji Durbin-Watson tidak dapat disimpulkan apakah terdapat autokorelasi atau tidak maka dilanjutkan dengan *runs test*. Berikut ini adalah hasil Uji Autokorelasi dengan uji statistik Durbin Watson :

Tabel: 4.5  
Uji Autokorelasi *Durbin Watson*

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,835 <sup>a</sup>	,697	,691	,46731	1,912

a. Predictors: (Constant), lnBM, KNJ, lnDP, lnPAD

b. Dependent Variable: ln\_KNJ

Sumber : Output SPSS 22

Nilai *Durbin Watson* pada output dapat dilihat dari gambar yaitu sebesar 1,912. Sedangkan nilai tabel pembandingan berdasarkan data Belanja Modal dengan melihat pada tabel DW, nilai  $dL, \alpha = 1,77171$ , sedangkan nilai  $dU, \alpha = 1,84876$ . Nilai  $dU, \alpha < dw < 4 - dU, \alpha$  yaitu  $1,491 < 1,118 < 2,509$ . Dengan demikian data tidak mengandung autokorelasi. Berikut ini adalah hasil dari uji autokorelasi *runs test*:

Tabel: 4.6  
Uji Autokorelasi *Run Test*

**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-,01595
Cases < Test Value	121
Cases >= Test Value	122
Total Cases	243
Number of Runs	115
Z	-,964
Asymp. Sig. (2-tailed)	,335

a. Median

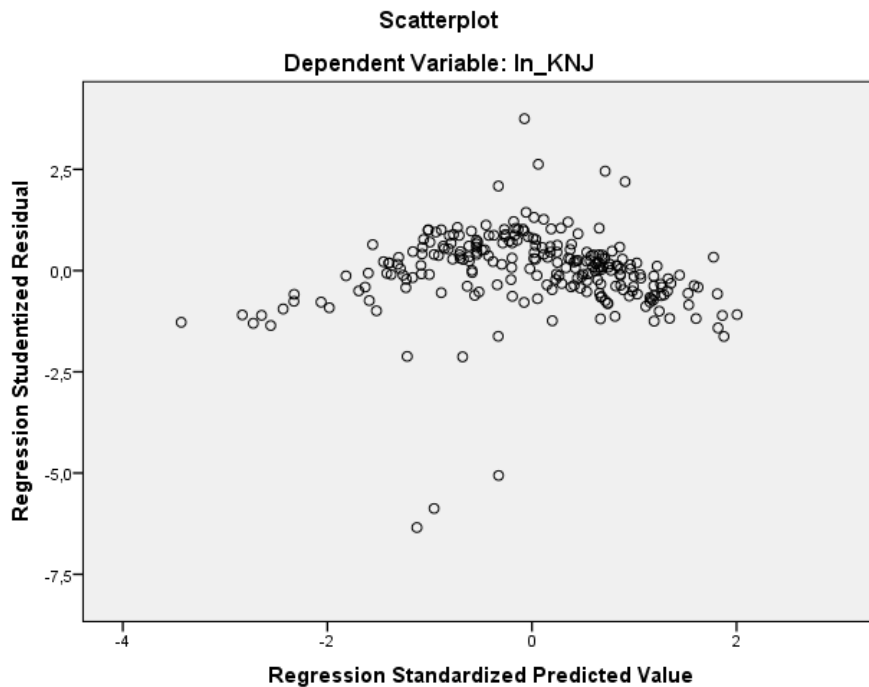
Sumber : Output SPSS 22

Hasil *runs test* menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed)  $> 0,05$  yang berarti hipotesis nol gagal ditolak. Dengan demikian data yang digunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi.

#### **4. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas regresi linear dapat terjadi bila terjadi homokedastisitas bukan heteroskedastisitas. Menguji apakah dalam sebuah model regresi telah terjadi ketidaksamaan varian dari residual atas suatu pengamatan lainnya adalah penting. Jika yang terjadi bahwa variannya tetap, maka ia disebut berada dalam kondisi homokedastisitas (Umar, 2003). Pada penelitian ini diuji dengan melihat grafik *Scatterplot*. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozalli, 2005). Cara yang dipakai dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y_{\text{prediksi}} - Y_{\text{sesungguhnya}}$ ) yang telah di-studentized. Dasar analisis yang dapat digunakan untuk menentukan heteroskedastisitas, antara lain :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas.



Sumber : Output SPSS 22

Gambar: 4.20

Hasil *Scatterplot* Model Setelah Ln

Hasil Scatterplot Model pada gambar 4.20 diatas dapat diketahui bahwa tidak ada pola yang teratur, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. Hasil uji Glesjer pada Tabel 4.6 di bawah ini menunjukkan koefisien parameter untuk variabel independen hanya

variabel PAD yang signifikan, hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil Uji *Glesjer* :

Tabel: 4.7  
 Hasil Uji *Glesjer* Setelah Ln  
 Coefficients<sup>(a)</sup>

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-,179	,239		-,747	,456		
InPAD	-,015	,007	-,182	-2,082	,038	,531	1,885
InDP	,011	,030	,047	,371	,711	,248	4,037
InBM	,022	,016	,145	1,378	,169	,364	2,746

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Sumber: Output SPSS 22

## 5. Analisis Regresi

Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kandungan LnPAD, LnDP, LnBM, terhadap Ln\_KNJ dengan melihat kekuatan hubungan antar LnBM dengan LnPAD, LnDP, LnBM. Model regresi linier berganda tersebut adalah :

$$\text{Ln\_KNJ} = a + b_1\text{LnPAD} + b_2\text{LnDP} + b_3\text{LnBM} + e$$

Berikut ini adalah hasil uji analisis regresi :

Tabel:4.8  
Uji Regresi setelah Ln

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,812	,321		21,250	,000
	LnPAD	,904	,010	1,229	93,978	,000
	LnDP	-,900	,040	-,433	-22,612	,000
	LnBM	-,040	,021	-,029	-1,861	,064

a. Dependent Variable: Ln\_KNJ

Sumber: Output SPSS

Dari Tabel diatas dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\text{Ln\_KNJ} = 6,812 + 0,904 \text{LnPAD} - 0,900 \text{LnDP} - 0,040 \text{LnBM} + 2,930$$

Model regresi tersebut bermakna :



- a. Nilai konstanta sebesar 6,812 artinya apabila nilai variabel LnPAD, LnDP, LnBM bernilai 0, maka anggaran belanja modal bernilai semakin bertambah.
- b. Variabel LnPAD menunjukkan ada pengaruh terhadap kinerja keuangan dan berpola positif sehingga semakin bertambah LnPAD maka semakin tinggi kinerja keuangan. PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai koefisien sebesar 0,904.
- c. Variabel LnDP menunjukkan ada pengaruh terhadap kinerja keuangan dan berpola negatif sehingga semakin bertambah LnDP maka semakin rendah kinerja keuangan. DP berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai koefisien sebesar -0,0900.
- d. Variabel LnBM menunjukkan ada pengaruh terhadap kinerja keuangan dan berpola negatif sehingga semakin bertambah LnBM maka semakin rendah kinerja keuangan. BM tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai koefisien sebesar -0,040.

## **6. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)**

### **1. Uji Koefisien Determinasi**

Nilai  $R^2$  digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu (1)

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel 4.9 berikut ini:

Tabel: 4.9

Hasil Koefisien Determinasi Setelah Ln

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,835 <sup>a</sup>	,697	,691	,46731

a. Predictors: (Constant), lnBM, KNJ, lnDP, lnPAD

b. Dependent Variable: ln\_KNJ

Sumber: Output SPSS

Hasil analisis regresi berganda dapat diketahui koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,691. Hal ini berarti 69,1% variabel kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu lnPAD, lnDP, dan lnBM, sedangkan 29,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

## 2. Uji Statistik F

Uji F (Pengaruh Secara Simultan). Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0.05 ( $\alpha = 5\%$ ). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria berikut :

- a. Bila nilai signifikansi  $f < 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima yang berarti koefisien regresi signifikan, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen
- b. Bila nilai signifikansi  $f > 0.05$ , maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak yang berarti koefisien regresi tidak signifikan. Hal ini berarti semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil Uji Statistik F dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel: 4.10  
 Hasil Uji Statistik F Setelah Ln  
 ANOVA<sup>b</sup>  
 ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	119,308	4	29,827	36,585	,000 <sup>b</sup>
	Residual	51,974	238	,218		
	Total	171,281	242			

a. Dependent Variable: Ln\_KNJ

b. Predictors: (Constant), LnBM, KNJ, LnDP, LnPAD

Sumber : Output SPSS 22

Hasil Uji statistik F pada tabel 4.8 diatas untuk menguji pengaruh LnPAD, LnDP, dan LnBM yang mempunyai F-hitung sebesar 36,585 dengan nilai signifikansi 0,000 hal ini berarti tingkat signifikansi  $< 5\%$  ( $\alpha = 0,05$ ) dan F hitung sebesar  $36,585 > F$ -tabel sebesar 2,63 yang artinya dapat disimpulkan bahwa PAD,DP dan BM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

### 3. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu per satu atau secara parsial. Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada tabel 4.7 sehingga dapat disimpulkan bahwa :

a. Pengujian hipotesis pertama ( $H_1$ )

Hasil uji parsial menunjukkan variabel independen yaitu pendapatan asli daerah (PAD) mempunyai nilai sig  $0,000 < 0,05$  dan arah koefisien regresi positif 1,229 yang berarti hipotesis pertama yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia. **diterima**

b. Pengujian hipotesis kedua ( $H_2$ )

Hasil uji parsial menunjukkan variabel independen yaitu dana perimbangan (DP) mempunyai nilai sig  $0,000 < 0,05$  dan arah koefisien regresi negatif -0,433 yang berarti hipotesis kedua yaitu dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia. **diterima**

b. Pengujian hipotesis ketiga ( $H_3$ )

Hasil uji parsial menunjukkan variabel independen yaitu belanja modal (BM) mempunyai nilai sig  $0,064 > 0,05$  dan arah koefisien regresi negatif -0,029 yang berarti hipotesis ketiga yaitu belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia. **ditolak**

#### **D. Pembahasan (Interpretasi)**

Penelitian ini menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian menunjukkan hipotesis yang diterima adalah pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan pengaruh belanja modal ditolak. Adapun penjelasan yang lebih rinci sebagai berikut:

##### **1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang bersih yang berhak diakui pemerintah daerah yang mana pemerintah daerah berwenang dan memiliki kebebasan dalam hal mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Semakin tingginya penerimaan PAD akan memaksimalkan pemerintah dalam pembangunan pemerintahan daerah yang berprinsip otonomi daerah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.

Hasil uji parsial bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil hipotesis pertama penelitian ini sejalan dengan penelitian menurut Wenny (2012), Florida (2006), dan Juliawati, et al. (2012) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan yang bersih yang

berhak diakui pemerintah daerah yang mana pemerintah daerah berwenang dan memiliki kebebasan dalam hal mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Semakin tingginya penerimaan PAD akan memaksimalkan pemerintah dalam pembangunan pemerintahan daerah yang berprinsip otonomi daerah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.

Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berupa pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena nantinya pendapatan asli daerah yang merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pembangunan daerah sehingga terciptanya daerah yang memiliki kemandirian daerah dan dapat terciptanya otonomi daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Dana perimbangan adalah sumber lain sebagai pembentuk pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah. Semakin besar dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka dapat mencerminkan tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah adalah rendah karena tingkat ketergantungan yang tinggi serta bersifat terikat tersebut membuat daerah tidak memiliki kewenangan dan

kebebasan dalam hal penggunaan sumber pendapatan tersebut sehingga prinsip otonomi daerah akan sulit tercapai jika pemerintah daerah bergantung pada dana perimbangan.

Hasil uji parsial bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil hipotesis kedua penelitian ini sejalan dengan penelitian menurut Juliawati et.al (2012) dan (Al-Farisi,2015) bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena semakin besar dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka dapat mencerminkan tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah adalah rendah karena tingkat ketergantungan yang tinggi serta bersifat terikat tersebut membuat daerah tidak memiliki kewenangan dan kebebasan dalam hal penggunaan sumber pendapatan tersebut sehingga prinsip otonomi daerah akan sulit tercapai jika pemerintah daerah bergantung pada dana perimbangan.

Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa dana perimbangan yang semakin tinggi diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat akan menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang semakin rendah atau menurun. Hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat .Tingkat kemandirian daerah yang rendah akan menunjukkan kinerja keuangan yang lemah atau kurang baik.

### **3. Pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Belanja modal adalah penambahan aset tetap/inventaris dengan cara melakukan perbelanjaan/pengeluaran yang nantinya diharapkan dapat menimbulkan manfaat lebih dalam satu periode akuntansi termasuk biaya pemeliharaan yang memiliki fungsi memelihara manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Hasil uji parsial bahwa belanja modal tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil hipotesis ketiga penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian menurut Priyo (2006), Nugroho (2012), Amrozi (2016) Nyoman (2016) yang mengungkapkan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena belanja modal berfungsi untuk mengakuisisi, membeli, membuat atau membangun suatu aset tetap yang nantinya akan berguna dan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah yang akan mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hal tersebut menunjukkan tidak adanya pengaruh dari belanja modal yang diasumsikan adalah pengeluaran kas pemerintah daerah untuk menambah aset tetap yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan mencerminkan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini menjadi pertimbangan bahwa adanya belanja modal yang berwujud aset tetap tidak serta merta menjadi cerminan bahwa dengan belanja modal yang dapat menjadi cerminan kinerja keuangan yang baik justru malah sebaliknya, belanja modal dapat menjadi objek pemborosan oleh pemerintah daerah bahkan menjadi sumber praktik dari korupsi. Dalam konteks lain yang mana belanja modal seharusnya



dapat bermanfaat untuk kemajuan dan pembangunan daerah justru menjadi tidak bermanfaat ketika pemerintah daerah salah sasaran dalam melaksanakan belanja modal yang tidak sesuai dengan daerahnya, sehingga tidak terciptanya *benefit* dan *impact* kepada daerah tersebut sehingga sulit untuk mencerminkan kinerja keuangan yang baik dalam pemerintah daerah.

Tabel 4.11

## Ringkasan Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H1	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia.	Diterima
H2	Dana Perimbangan berpengaruh signifikan negatif Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia.	Diterima
H3	Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia.	Ditolak